

Penulis:

Johan Kristantara

Afiliasi:

Sekolah Tinggi Filsafat
Theologi Jakarta

Korespondensi:

johan.kristantara@gkj.
or.id

© JOHAN
KRISTANTARA

DOI: 10.21460/gema.
2021.61.620

This work is licenced
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International Licence.

SHARED LEADERSHIP AND MINISTRY

Transformation of Roles of Cell-Group Leaders in Gereja Kristen Jawa Bekasi Timur

Abstract

This article proposes a transformation of leadership in a congregation by transforming roles of cell leaders. The research departs from a concern that leadership in many churches—including Gereja Kristen Jawa (GKJ) Bekasi Timur—tends to be oriented and centralized to ministerial offices (pastors, elders, and deacons). Consequently, the roles of lay leadership have not been given enough attention. This research employs an empirical-analytical approach—enquiring empirical perceptions of leadership in a congregation and analyzing them with church leadership concepts from Kevin G. Ford and E. Stanley Ott. The methods used in this research are qualitative field research (by conducting deep interviews) as well as literary research (using closely-related books and journal articles). The finding of this research suggests that shared leadership and ministry transforms centralized leadership (autocracy) culture, making possible various ministries to be carried out in more vital and effective ways.

Keywords: cell leaders, lay leadership, shared leadership and ministry, transforming leadership, church development.

BERBAGI KEPEMIMPINAN DAN PELAYANAN

Transformasi Peran Ketua Kelompok di Gereja Kristen Jawa Bekasi Timur

Abstrak

Artikel ini menawarkan transformasi kepemimpinan jemaat dengan mentransformasikan peran para ketua kelompok. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan bahwa kepemimpinan di banyak gereja—

termasuk di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Bekasi Timur—cenderung berorientasi dan berpusat pada jabatan gerejawi (pendeta, penatua/tua-tua, dan diaken). Akibatnya, peran kepemimpinan warga jemaat biasa kurang mendapat perhatian. Artikel ini menggunakan metode empiris-analitis, yang menggali persepsi empiris kepemimpinan jemaat lalu menganalisisnya dengan konsep-konsep kepemimpinan gereja dari Kevin G. Ford dan E. Stanley Ott. Teknik yang dipakai dalam kajian ini adalah penelitian lapangan kualitatif (dengan melakukan wawancara mendalam) dan penelitian pustaka (menggunakan buku-buku dan artikel-artikel jurnal terkait). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbagi kepemimpinan dan pelayanan memungkinkan kultur kepemimpinan yang sentralistik (otokrasi) ditransformasikan menjadi kultur desentralistik yang berbagi sehingga pelayanan-pelayanan akan berjalan secara lebih hidup dan efektif.

Kata-kata kunci: berbagi kepemimpinan dan pelayanan, kepemimpinan warga jemaat biasa, ketua kelompok, kepemimpinan transformatif, pembangunan jemaat.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan selalu menjadi topik yang digagas dalam setiap teori dan wacana pembangunan jemaat atau transformasi gereja. Topik ini agaknya menjadi titik simpul di mana kita bisa mengajukan satu pernyataan bahwa gereja bukan sekadar gedungnya, bukan pula hanya orang-orang di dalamnya, melainkan juga kepemimpinan yang menuntun dan memberdayakan orang-orang atau umat itu ke arah pemenuhan misinya di dunia. Dewan Gereja-gereja Sedunia, melalui dokumen *Baptism, Eucharist, and Ministry* (BEM), mengemukakan bahwa tanggung jawab utama pemimpin gereja adalah menghimpun dan membangun tubuh Kristus dengan pemberitaan dan pengajaran firman Allah, perayaan sakramen, dan kepemimpinan atas kehidupan jemaat melalui ibadah, misi, dan pelayanan kasih (World Council of Churches, 1982: 22).

Baik Pokok-Pokok Ajaran GKJ (PA-GKJ maupun Tata Gereja dan Tata Laksana

GKJ (TGTL-GKJ) menegaskan bahwa kepemimpinan jemaat di Gereja-gereja Kristen Jawa (GKJ) tidaklah berpusat pada satu orang saja, melainkan pada sebuah dewan kepemimpinan yang disebut sebagai majelis gereja (Sinode GKJ, 2005: 43). Walau demikian, pada kenyataannya, karakter memusat (sentralistik) kepemimpinan jemaat masih terlihat dalam peran Sidang Majelis Pekerja Lengkap (Sidang MPL)¹ yang kian menjadi pusat pengambilan segala keputusan jemaat. Begitu banyak persoalan dalam kehidupan bergereja, baik yang bersifat pemeliharaan keselamatan, perawatan kasih, penatalayanan dan kebhendahaan, maupun hal-hal administratif dan organisatoris, harus diputuskan dalam Sidang MPL.

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bahwa kepemimpinan jemaat di GKJ, menurut penulis, masih bersifat memusat (sentralistik). Melalui tulisan ini, penulis menawarkan upaya transformasi kepemimpinan jemaat melalui *pendekatan berbagi kepemimpinan dan*

pelayanan antara kepemimpinan yang ditahbiskan dan diteguhkan (pejabat gerejawi)² dan kepemimpinan warga jemaat biasa³ (dalam hal ini ketua kelompok). Pendekatan berbagi kepemimpinan dan pelayanan memandang kepemimpinan jemaat sebagai pelayanan yang utuh, namun harus dibagi; diwujudkan dalam rupa-rupa karya yang berbeda, namun saling melengkapi. E. Stanley Ott mengutarakan pentingnya perubahan dari pelayanan yang terpusat kepada pelayanan yang berbagi (*shared ministry*) di antara para pejabat gerejawi dan umat (Ott, 2002: 79-82). Kevin Graham Ford menyebut praktik kepemimpinan semacam itu sebagai “*shared leadership*” (Ford, 2008: 35). Ford mengingatkan, “Unhealthy churches tend to be overly autocratic or bureaucratic, while healthy churches view leadership as a shared function and as a ministry” (Ford, 2008: 32-33).

Kajian pembangunan jemaat dalam tulisan ini menggunakan metode empiris-analitis, yang menggali persepsi empiris dari para ketua kelompok pelayanan pada sebuah jemaat di Kota Bekasi, yaitu GKJ Bekasi Timur, melalui sebuah penelitian lapangan. Lebih lanjut, penulis menganalisis data empiris tersebut menggunakan teori kepemimpinan jemaat dari Kevin Graham Ford dan E. Stanley Ott. Selanjutnya, penulis menawarkan sebuah rekomendasi transformasi kepemimpinan jemaat melalui pendekatan berbagi kepemimpinan dan pelayanan. Rekomendasi tersebut bersifat praktis dan lokal, namun tentu saja dapat juga dimanfaatkan pada konteks lokal yang berbeda, bahkan dalam konteks partikular yang lebih luas (klasikal atau sinodal).

PERAN KETUA KELOMPOK DI GKJ BEKASI TIMUR

Secara partikular, Tata Gereja GKJ memandang identitas jemaat GKJ sebagai gereja yang berada di suatu tempat tertentu, yang bertumbuh dan berkembang dengan tradisi teologi kristiani yang berjumpa dengan nilai-nilai budaya Jawa (Sinode GKJ, 2015: 8). Salah satu strategi pemeliharaan keselamatan GKJ adalah melalui pembagian wilayah pelayanan (Sinode GKJ, 2015: 14). Mengenai pembagian wilayah pelayanan, Tata Laksana GKJ, Bab I, pasal 4 ayat 2 menjelaskan bahwa sebuah jemaat GKJ dapat terdiri dari gereja induk dan *pepanthan*. Gereja induk dan *pepanthan* dapat terdiri dari wilayah, blok/kring/kelompok, yang pembagiannya ditentukan oleh jemaat GKJ itu sendiri (Sinode GKJ, 2015: 36) berdasarkan letak geografis atau tempat tinggal warga gereja (Sinode GKJ, 2015: 49).

Sebuah kelompok dibentuk atas dasar kebutuhan maupun pembiakan. Pembentukan atau pembiakan kelompok-kelompok itu disahkan melalui keputusan Sidang MPL yang dituangkan dalam sebuah surat keputusan majelis gereja. Surat keputusan itu sekaligus menyebutkan personalia badan pengurus kelompok, yang paling tidak terdiri dari posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Para pengurus kelompok dilantik dalam satu ibadah Minggu menggunakan tata aturan pelantikan badan pembantu majelis atau badan pelayanan jemaat.⁴ Ketua kelompok (beserta jajaran kepengurusan kelompok), dengan demikian, merupakan wujud kepemimpinan warga biasa (*lay leaders*) yang melayani di sebuah jemaat GKJ.

Untuk mendapatkan data dan perspektif empiris, penulis melakukan penelitian lapangan menggunakan teknik wawancara personal dan mendalam dengan ketua-ketua kelompok GKJ Bekasi Timur.⁵ Tujuan dari penelitian lapangan itu adalah untuk mendapatkan data empiris, yaitu apa dan bagaimana persepsi para ketua kelompok GKJ Bekasi Timur mengenai perannya sebagai ketua kelompok, juga relasinya dengan para pemimpin lain di tengah jemaat.

GKJ Bekasi Timur merupakan jemaat yang didedahkan pada 22 Januari 2011. Jemaat ini berkedudukan di Kelurahan

Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Berdasarkan data tahun 2019, GKJ Bekasi Timur beranggotakan 1.236 orang, terdiri dari 615 laki-laki dan 621 perempuan (GKJ Bekasi Timur website, 2019). Secara demografis, seluruh wilayah pelayanan GKJ Bekasi Timur berada di Provinsi Jawa Barat, tercakup ke dalam wilayah tiga daerah tingkat dua, yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Wilayah pelayanan GKJ Bekasi Timur dibagi ke dalam 9 kelompok yang dilayani oleh para ketua kelompok, sebagai berikut:

Tabel 1. Ketua Kelompok GKJ Bekasi Timur dan Masa Pelayanannya
(Diurutkan menurut durasi masa pelayanan).

| No. | Nama Kelompok | Nama Ketua Kelompok | Masa Pelayanan |
|-----|----------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | Perumnas III | Sutrisno | < 1 tahun |
| 2 | Cikarang | Kristiawan Yohanes Saputro | 1 tahun |
| 3 | Cibitung | Petra Purnayoga | 2 tahun |
| 4 | Bekasi Timur Regensi | Nugroho Widi Prasetyo | 2,5 tahun |
| 5 | Karawang | Darmadi | 2,5 tahun |
| 6 | Margahayu | Joko Supriyanto | 2,5 tahun |
| 7 | Wisma Jaya | Rapatatja Dasarius Pontolumiu | 2,5 tahun |
| 8 | Jatimulya | Agung Widyo Hadi Priatmo | 6 tahun |
| 9 | Tambun | Hengky Andri Natanael | 9 tahun |

1. Wawancara Mendalam dengan Ketua Kelompok GKJ Bekasi Timur

Penulis memilih menggunakan wawancara mendalam sebagai teknik menggali persepsi para ketua kelompok GKJ Bekasi Timur mengenai perannya di tengah jemaat. Wawancara dilakukan dua kali, melibatkan kesembilan ketua kelompok sebagaimana dalam tabel di atas. Dalam wawancara

pertama, penulis mengajukan beberapa pertanyaan pokok/utama yang sifatnya mendasar, yaitu mengenai pengalaman, suka-duka, persoalan yang muncul dalam kelompok, dan bagaimana mereka menjalin relasi dengan warga kelompok maupun dengan penatua dan diaken yang melayani di kelompoknya.

Pada wawancara kedua, penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang lebih

mendalam mengenai peran ketua kelompok dalam menyelesaikan permasalahan, dan relasi ministerialnya dengan pemimpin formal lain di kelompok. Berhubung kondisi pandemi yang masih berlangsung, dan Kota Bekasi masih termasuk ke dalam “zona merah”, penulis menggunakan teknik daring dengan wawancara online. Wawancara itu, pertama-tama, menggali pemahaman para ketua kelompok mengenai tugas dan perannya. Selanjutnya, digali pula persepsi para ketua kelompok terhadap masalah-masalah yang terjadi di kelompok dan bagaimana mereka menyelesaikannya (*problem solving*). Pada bagian lain digali pula pemahaman para ketua kelompok mengenai relasinya dengan para penatua dan diaken, serta pembagian peran di antara mereka.

2. Hasil Wawancara dengan Ketua Kelompok GKJ Bekasi Timur

- a. Masa pelayanan yang sudah dijalani oleh para ketua kelompok cukup beragam. Ada yang baru beberapa bulan melayani karena menggantikan ketua kelompok yang sakit.⁶ Namun ada pula yang sudah 6-9 tahun melayani (karena sudah melayani tiga hingga empat periode pelayanan).⁷ Sejak tahun 2017, majelis jemaat telah menetapkan bahwa satu periode masa pelayanan pengurus kelompok adalah tiga tahun, tidak lagi dua tahun seperti sebelumnya. Walau demikian, bisa jadi seseorang menjadi ketua kelompok lebih dari tiga tahun, sebagaimana terlihat pada tabel di atas. Hal ini disebabkan belum adanya ketentuan dalam TGTL-GKJ, sampai berapa periode maksimum seseorang dapat melayani sebagai ketua kelompok.
- b. Para ketua kelompok menyadari tugas-tugas pelayanan mereka cukup banyak. Paling tidak, kesembilan ketua kelompok sepakat atas empat tugas pelayanan, yaitu: (1) menyusun rencana program (kegiatan) dan anggaran kelompok, (2) mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kelompok, (3) melakukan kunjungan atau pelawatan (*patuwen*) kepada warga kelompok, dan (4) membantu warga yang terkena bencana.⁸ Beberapa tugas pelayanan lain juga diungkapkan oleh beberapa ketua kelompok, yaitu menghimpun dan mengelola persembahan, melayankan bakti sosial kepada lingkungan sekitar, ambil bagian dalam pelayanan kedukaan (*sripah*), dan melakukan rapat bersama penatua dan diaken. Ada tiga ketua kelompok yang mengungkapkan bahwa menolong menyelesaikan masalah rumah tangga dan melayani konseling warga kelompok adalah juga tugasnya.
- c. Keprihatinan yang paling banyak diungkapkan oleh para ketua kelompok adalah tingkat partisipasi warga jemaat dalam kegiatan-kegiatan di kelompok. Ungkapan-ungkapan seperti, “jumlah yang hadir kurang dari ekspektasi”⁹, “peserta PA hanya sedikit”¹⁰, “kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan dukungannya masih kecil”¹¹, “tidak semua warga bisa aktif”¹¹, “warga yang hadir dalam persekutuan hanya sedikit dan warga yang itu-itu saja”¹³, “yang hadir belum

ada 50%”¹⁴, menunjukkan adanya harapan para ketua kelompok bahwa warganya lebih banyak terlibat dalam kegiatan.

Keprihatinan ini disikapi beragam oleh para ketua kelompok. Ada yang merasa sedih, kecewa, prihatin, dan malu, namun ada juga yang menyikapinya dengan menggunakan sudut pandang lain, misalnya dengan memaklumi bahwa warga jemaat mempunyai prioritas dan kebutuhan kegiatan jemaat yang beragam, atau bahkan melihat persoalan itu sebagai sarana introspeksi diri dan pelayanan. Para ketua kelompok melihat beberapa kemungkinan penyebab masalah ini, yaitu kesibukan kerja (karena jadwal kerja secara *shift*), kondisi kesehatan, waktu kegiatan yang dirasa kurang pas, bentuk kegiatan yang monoton, rasa canggung karena belum akrab dengan warga lain, tempat kegiatan yang jauh dari kebanyakan rumah warga, kurangnya kesadaran dalam memelihara iman, tidak ada yang mengantar (khususnya lansia), dan rasa rendah diri atau takut kalau-kalau diminta berdoa atau memimpin liturgi.¹⁵

d. Para ketua kelompok mampu mengenali adanya masalah di kelompok, misalnya respons negatif terhadap kegiatan jemaat atau kegiatan kelompok sebagaimana tersebut di atas, persoalan rumah tangga, bahkan relasi antarwarga jemaat. Dalam menyelesaikan masalah semacam itu,

ketua kelompok mengutamakan pendekatan internal kelompok.¹⁶ Semua ketua kelompok mengungkapkan bahwa mereka pernah berkonsultasi dengan penatua dan diaken yang ada di kelompoknya¹⁷, atau jika diperlukan akan melibatkan pendeta.¹⁸ Ketika terjadi relasi kurang baik antarwarga, ada ketua kelompok yang tidak ragu terlibat dalam proses mediasi dan rekonsiliasinya, namun ada pula yang merasa sungkan oleh karena merasa masih lebih muda daripada warga yang bermasalah tersebut.¹⁹

Dalam menghadapi masalah, para ketua kelompok menjadikan penatua dan diaken terdekat di kelompoknya menjadi mitra untuk mengkonsultasikan masalah itu dan mencari jalan keluar. Ketika ketua kelompok menceritakan kepada anggota majelis jemaat di kelompoknya mengenai persoalan ini, umumnya reaksi atau respons yang mereka dapatkan adalah nasihat untuk tetap semangat, tidak menyerah, terus melakukan kegiatan berapa pun warga yang hadir, perlunya melakukan kunjungan warga, dan mengajak rapat bersama untuk membahas persoalan-persoalan.²⁰

e. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan masalah yang paling banyak diungkapkan oleh para ketua kelompok adalah soal perbedaan usia. Jika warga yang terkait dengan masalah itu lebih tua/senior daripada dirinya, ketua kelompok merasa

sungkan. Kedua, terjadinya perbedaan pendapat hingga ketersinggungan dari seorang warga terhadap warga lainnya, terhadap pengurus kelompok, bahkan terhadap majelis jemaat. Ketiga, ketiadaan keinginan atau itikad baik dari warga terkait untuk menyelesaikan masalahnya. Walau demikian, para ketua kelompok juga dapat menarik manfaat atau pembelajaran dari upaya menyelesaikan masalah di kelompok, yaitu: (1) membentuk kedewasaan baik bagi karakter pribadi maupun dalam kualitas kepemimpinan dan pelayanan (menjadi pendengar yang baik, lebih berhati-hati berbicara, lebih bijak dalam mengambil keputusan), (2) memahami dan menerima rupa-rupa karakter orang dan perbedaan cara pandang, dan (3) menjadikannya pembelajaran bagi diri dan keluarganya sendiri.

- f. Para ketua kelompok menjalin relasi dan membangun keguyuban dengan warga jemaat menggunakan beberapa metode. *Pertama*, yang digunakan di semua kelompok, adalah melalui grup dalam aplikasi pesan berjejaring (*network messaging*) WhatsApp (lazim disebut “grup WA”). *Kedua*, yang juga lazim dilakukan di kelompok-kelompok, adalah perkunjungan atau pelawatan. Perkunjungan dilakukan dengan cara formal (bersama penatua dan diaken) maupun informal (melalui kegiatan olahraga, misalnya bersepeda²¹). Cara *ketiga* adalah dengan membentuk sub-

kelompok, baik berdasarkan wilayah (biasanya disebut “sel” atau “KTB” [kelompok tumbuh bersama]) maupun berdasarkan usia atau jender (misalnya dengan mengadakan penelaahan Alkitab untuk anak, remaja, pemuda, atau kaum ibu). Beberapa ketua kelompok juga mengemukakan cara *keempat*, yaitu melalui kegiatan kebersamaan, misalnya: retreat, kebaktian padang, perjamuan kasih awal tahun, *gathering*, atau acara *ngopi* bareng.²² Dari penuturan para ketua kelompok di berbagai kesempatan, penulis mendapatkan kesan bahwa grup WA efektif untuk saling menyapa dan memberi ucapan selamat (ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan), namun tidak cukup efektif untuk menggerakkan warga berpartisipasi dalam kegiatan. Metode perkunjungan dirasakan lebih efektif karena setelah dikunjungi, warga tersebut menjadi lebih aktif. Kegiatan-kegiatan kebersamaan, seperti retreat atau kebaktian padang, memang masih menjadi andalan untuk menghimpun warga kelompok dalam jumlah banyak, meningkatkan semangat kebersamaan, dan menyosialisasikan program kelompok, karena sifatnya lebih santai. Tampaknya kecenderungan ini berkaitan dengan kultur kejawaan yang senang berkumpul.

- g. Para ketua kelompok menyadari bahwa di kelompok yang dilayaninya ada pihak lain yang juga menjalankan kepemimpinan, yaitu penatua

dan diaken. Dari sembilan ketua kelompok, enam orang melihat dirinya sebagai mitra sejajar dari para pejabat gerejawi, sementara tiga lainnya mengungkapkan bahwa posisi ketua kelompok adalah di bawah penatua dan diaken, dan berperan sebagai pembantu majelis jemaat. Konsekuensi dari kedua pandangan ini terkait dengan kemampuan para ketua kelompok mengambil keputusan secara mandiri. Ada beberapa ketua kelompok yang merasa berwenang dan mampu mengambil keputusan secara mandiri atas pelayanan-pelayanan di kelompok, sedangkan ada pula yang meyakini bahwa semua keputusan di kelompok harus diputuskan bersama dengan para penatua dan diaken. Beberapa kelompok memiliki kebiasaan rutin mengadakan rapat atau pertemuan antara pengurus kelompok dengan penatua dan diaken²³, baik untuk merencanakan pelayanan maupun untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah terlaksana.²⁴

PERAN KETUA KELOMPOK GKJ BEKASI TIMUR DITINJAU DARI BEBERAPAKONSEPKEPEMIMPINAN JEMAAT

John R.P. French dan Bertram Raven menyajikan tipologi kekuasaan sosial berdasarkan apa yang mendasarinya (*the bases of social power*), yaitu: (1) kekuasaan berdasarkan imbalan (*reward power*), (2) kekuasaan berdasarkan paksaan (*coercive*

power), (3) kekuasaan berdasarkan keabsahan (*legitimate power*), (4) kekuasaan berdasarkan referensi (*referent power*), dan (5) kekuasaan berdasarkan kepakaran (*expert power*) (French dan Raven, 1959: 150-167). Bagaimana dengan kepemimpinan di tengah jemaat?

1. Analisis Hasil Wawancara dengan Konsep *Shared Leadership* Kevin G. Ford dan *Shared Ministry* E. Stanley Ott

Kepemimpinan yang berbagi (*shared leadership*) adalah istilah yang digunakan oleh Ford untuk menggambarkan salah satu dari lima kultur bergereja yang sehat. Kultur kepemimpinan yang tidak sehat dalam kehidupan gereja disebutnya kultur otokrasi (*autocracy*). Ford mengungkapkan:

In transforming churches, the task of leadership is a shared responsibility. This stands in contrast to much of American culture. Most American forms of leadership are based on the cultural notion that leadership equals power. The leader is the person with the most control. Sometimes power is rooted in position—the CEO, the president, the pastor, or the board. Sometimes power is the product of personal charisma or charm.... Leadership, in a transforming church, is much less about who gets to make decisions and much more about how best to fulfill the church's mission in an ever-changing context. A transforming church develops a multiplying group of leaders who lead by serving in this way (Ford, 2008: 35).

Melalui kultur kepemimpinan yang berbagi, Ford memperhadapkan *kepemimpinan melalui kekuasaan* dengan *kepemimpin-*

an melalui pelayanan. Kepemimpinan sebagaimana Ford maksudkan bukan berarti menegaskan pentingnya kekuasaan (misalnya kekuasaan dalam jabatan gerejawi yang didasarkan atas legitimasi), melainkan menganjurkan kultur *berbagi* kekuasaan. Kepemimpinan yang berbagi lebih banyak mengajak dan melibatkan segenap jemaat ketimbang memaksa dan memerintah mereka (Ford, 2008: 142). Ndapamuri dan Objantoro memandang pentingnya sebuah “sistem pembagian tugas pelayanan yang memungkinkan setiap pelayan mendapat kesempatan yang sama sesuai karunia dan talenta untuk melayani bersama” (Ndapamuri dan Objantoro, 2019: 130).

Para ketua kelompok GKJ Bekasi Timur sebenarnya sudah memahami bahwa mereka juga mengemban tugas pelayanan yang cukup banyak di tengah kelompok yang dipimpinnya. Dengan kata lain, pemahaman bahwa sifat kepemimpinan jemaat adalah pelayanan—sebagaimana diajarkan dalam PPA-GKJ (Sinode GKJ, 2005: 43)—sudah tercermin dalam persepsi mereka. Secara teoretik, mereka juga sudah memahami bahwa ketua kelompok adalah mitra sejajar majelis jemaat dalam menjalankan pelayanan. Walau begitu, kita melihat dari hasil wawancara bahwa persepsi kesejajaran itu tidak selalu dibarengi dengan keberanian untuk mengambil keputusan secara mandiri. Kebanyakan ketua kelompok masih merasa bahwa mereka harus mendapatkan persetujuan dari penatua dan diaken di kelompoknya untuk mengambil keputusan-keputusan pelayanan tertentu. Sisi positif dari hal ini, pengambilan keputusan oleh para pemimpin

di kelompok (baik penatua, diaken, maupun ketua kelompok) memang selalu akan menghasilkan keputusan bulat, jarang terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*). Namun, sisi negatifnya, ketua kelompok bisa menjadi sangat tergantung pada majelis jemaat dalam mengambil keputusan, bahkan untuk hal-hal yang sifatnya teknis pelayanan.

Kegamangan para ketua kelompok dalam mengambil keputusan secara mandiri ini mungkin disebabkan oleh kekuatiran mereka akan terjadinya pro-kontra di tengah warga kelompok terhadap keputusan yang diambil. Kekuatiran ini sesungguhnya bisa diatasi dengan membangun kedekatan kepada warga kelompok. Dalam kultur kepemimpinan yang berbagi, membangun kedekatan merupakan tugas seorang pemimpin. Kedekatan bertujuan membangun kepercayaan. Kepercayaan merupakan titik berangkat atau dasar yang penting untuk membangun kepemimpinan yang berbagi. Kepercayaan juga merupakan jembatan yang memungkinkan seorang pemimpin mengatasi persoalan pro-kontra yang tak terhindarkan di tengah jemaat (Ford, 2008: 143-144). Memang diperlukan waktu dan upaya yang cukup untuk membangun kedekatan antara seorang ketua kelompok dan warganya. Karena itu, keputusan majelis jemaat GKJ Bekasi Timur pada tahun 2017 untuk mengubah periode pelayanan ketua kelompok dari dua tahun menjadi tiga tahun adalah keputusan yang tepat. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh para ketua kelompok, sebagaimana terungkap dalam hasil wawancara, memperlihatkan keseriusan mereka membangun kedekatan dengan warganya.

Walau demikian, berkaitan dengan kultur berbagi pelayanan (*shared ministry*), apa yang dikemukakan oleh Ott soal tiga perubahan atau transformasi yang perlu dilakukan terkait kepemimpinan jemaat perlu menjadi perhatian. Ott mengungkapkan perlunya: (1) perubahan dari pelayanan yang “menunjuk/menugasi pemimpin” menuju pelayanan yang “mempersiapkan pemimpin”, (2) perubahan dari kepemimpinan yang memegang kendali (*controlling*) menuju kepemimpinan yang mengutus (*delegating*) dengan memberi wewenang, dan (3) perubahan dari pelayanan yang terpusat pada pendeta atau pejabat gerejawi menuju pelayanan yang berbagi di antara para pejabat gerejawi dan warga jemaat (Ott, 2002: 67-83). Belum adanya ketentuan soal sampai berapa periode maksimum seseorang bisa menjabat sebagai ketua kelompok di GKJ, menciptakan kebiasaan bersama di mana kalau seseorang sudah melayani sebagai ketua kelompok dengan baik, maka ia akan terus ditunjuk sebagai ketua kelompok. Dengan demikian, transformasi ke arah “mempersiapkan pemimpin”, sebagaimana dikemukakan Ott, tidak dapat terwujud.

Pemberian wewenang kepada para ketua kelompok untuk menjalankan peran kepemimpinan—termasuk di dalamnya mengambil keputusan-keputusan—juga belum memiliki dasar ketentuan yang jelas. Akibatnya, beberapa ketua kelompok merasa dirinya sebagai pembantu majelis jemaat saja. Ketika dalam wawancara ditanyakan apa saja pelayanan penatua dan diaken di mana ketua kelompok tidak bisa terlibat, para ketua kelompok bisa menyebutkan dengan baik. Namun demikian, ketika ditanyakan

yang sebaliknya, mereka menjawab bahwa penatua dan diaken bisa terlibat dalam semua pelayanan ketua kelompok.²⁵ Hal ini mengindikasikan belum jelasnya batas-batas wewenang dalam mengelola pelayanan di kelompok—antara penatua dan diaken dengan ketua kelompok.

Dalam menguraikan perubahan yang ketiga, Ott menggunakan pemahaman BEM tentang umat, yaitu *the whole people of God*.²⁶ Ia mengungkapkan bahwa pada gereja transformasional, para pejabat gerejawi menjadi pemimpin yang memperlengkapi warga jemaat untuk ambil bagian dalam pelayanan (Ott, 2002: 79), alih-alih memusatkan kepemimpinan pada dirinya. Mempersiapkan pemimpin berarti melatih warga jemaat menjadi calon pemimpin, demi kepemimpinan di masa depan (Octavianus, 2020: 86).

Mark Maddix mencoba menggali dasar-dasar biblis dan historis atas kepemimpinan gereja, dan tidak menemukan adanya pola-pola normatif bagi dikotomi kepemimpinan pejabat gerejawi (*clergy*) dan kepemimpinan warga biasa (*laity*), baik dalam Alkitab maupun dalam ajaran reformasi—keduanya mendukung kesetaraan antara pemimpin yang ditahbiskan/diteguhkan dan warga biasa (Maddix, 2009: 215-221). Ia pada akhirnya menyimpulkan, “Therefore, a new pattern based on the biblical witness includes a shared ministry need to emerge, a partnership among all participants of the people of God. This pattern will happen when clergy understand their role as servant leaders and are willing to both trust and equip laypersons for service in the Kingdom of God” (Maddix, 2009: 226).

Berefleksi dari tulisan Maddix, Russell Huizing mengaitkan kepemimpinan jemaat dan misi gereja dengan mengungkapkan bahwa jemaat merupakan suatu persekutuan di mana segenap warganya berupaya mewujudkan misi gereja dengan mengambil peran kepemimpinannya masing-masing. Itu berarti jemaat perlu membangun kemitraan yang lebih erat antara para pejabat gerejawi dan warga jemaat biasa. Keduanya perlu berkarya bersama untuk memenuhi misi Allah (Huizing, 2011: 67). Relasi antara ketua kelompok dengan penatua dan diaken di satu kelompok perlu diarahkan untuk membangun dan merawat kemitraan sejajar—sebagaimana dipahami sebagian besar ketua kelompok GKJ Bekasi Timur.

2. Refleksi atas Peran-Peran Strategis Ketua Kelompok GKJ Bekasi Timur

Peran warga jemaat biasa dalam menjalankan kepemimpinan jemaat merupakan sebuah keniscayaan, bukan hanya dalam konteks GKJ. Jan Hendriks mengungkapkan bahwa salah satu hal penting yang membangun kepemimpinan yang menggairahkan adalah adanya iklim positif, di mana warga biasa diperlakukan secara serius dan sebagai subjek, demi terwujudnya tujuan komunitas. Warga jemaat biasa perlu ikut mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam kepemimpinan (Hendriks, 2002: 50-51). Warga biasa memegang peran sebagai subjek dalam komunitas, termasuk dalam memutuskan tujuan-tujuan organisasi (Hendriks, 2002: 54).

Melalui analisis atas konsep kepemimpinan jemaat oleh Ford dan Ott di atas, kita dapat menarik kesimpulan

bahwa kepemimpinan para ketua kelompok merupakan bagian yang esensial dalam kehidupan jemaat. Peran warga biasa dalam kehidupan berjemaat bukanlah sekadar sebuah aksesori atau pelengkap, misalnya membantu para pejabat gerejawi melakukan tugas-tugas liturgis dan organisatoris saja. Para ketua kelompok memiliki tempat dan peran khusus yang penting dalam membangun jemaat menjadi gereja yang misional.

Ada tiga peran yang sesungguhnya dijalankan oleh para ketua kelompok GKJ Bekasi Timur.

- a. *Peran Organisatoris.* Ketua kelompok adalah pemimpin yang merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, menggerakkan partisipasi, dan juga mengevaluasi kegiatan-kegiatan di kelompok, terutama kegiatan pemeliharaan iman. Seorang pemimpin perlu memiliki kecakapan untuk menggerakkan umat mengambil bagian dalam pelayanan (Ford, 2008: 151-153). Para ketua kelompok melalui peran organisatorisnya dapat memainkan perannya sebagai pemimpin dari warga jemaat biasa. Ipaq dan Wijaya mengungkapkan bahwa peran organisatoris merupakan salah satu wujud karakter kepemimpinan para rasul Yesus yang menata jemaat dengan keteraturan, kontrol, dan fokus pada tujuan (Ipaq dan Wijaya, 2019: 116).
- b. *Peran Pastoral.* Melalui berbagai upaya membangun kedekatan dan menyelesaikan berbagai masalah

di kelompok, ketua kelompok mengenal warga jemaatnya serta mengenali persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan jemaat di kelompoknya. Peran pengembalaan oleh para ketua kelompok, yang dengan ketekunannya membangun relasi dan paguyuban jemaat melalui perkunjungan, merupakan bentuk kepemimpinan yang sangat strategis dalam kehidupan gereja. Kesediaan seorang ketua kelompok untuk melayani bersama semua warga di kelompoknya (bukan orang-orang tertentu saja), merupakan cerminan dari karakter kepemimpinan Yesus yang melayani bukan hanya untuk memuaskan sekelompok orang, melainkan semua orang (Katarina dan Siswanto, 2018: 96).

- c. *Peran Sinergis*. Dalam relasinya dengan para pemimpin lain di dalam kelompok, yaitu para penatua dan diaken, ketua kelompok membangun sinergi. Melalui sinergi antara pejabat gerejawi, yaitu penatua dan diaken, dan pemimpin dari warga jemaat biasa, yaitu ketua kelompok, pelayanan jemaat menjadi sebuah *shared ministry* dan *shared leadership*, di mana *clergy* maupun *laity* menjadi mitra pelayanan bagi satu sama lain. Sebagaimana diidealkan oleh Hendriks, peran sinergis ketua kelompok dalam relasi *shared ministry* memberi kontribusi bagi vitalisasi jemaat (Hendriks, 2002: 67). Ketika para pejabat gerejawi menjalankan karya pastoralnya, ketua kelompok mengambil posisi sebagai

katalisator bagi jalannya karya pastoral itu. Para pejabat gerejawi juga berperan sebagai motivator bagi para ketua kelompok, dengan memberikan rupa-rupa motivasi pelayanan (Dece, 2019: 31-32).

Ketiga peran tersebut menegaskan bahwa para ketua kelompok memiliki peran-peran yang khas dalam kehidupan berjemaat. Baik ketua kelompok maupun pendeta, penatua, dan diaken mestinya membentuk sebuah sinergi pelayanan yang peran dan karyanya saling mengutuhkan di tengah jemaat. Untuk itu, gereja perlu menyusun suatu ketentuan ministerial bagi peran ketua kelompok, yang notabene adalah pemimpin dan pelayan jemaat.

TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN JEMAAT MELALUI PENDEKATAN KEPEMIMPINAN DAN PELAYANAN YANG BERBAGI

PPA-GKJ mengungkapkan bahwa aspek manusiawi dari kepemimpinan gereja diwujudkan dalam suatu kepemimpinan dewan yang disebut majelis gereja. Di dalamnya terdapat tiga pejabat gerejawi, yaitu penatua, diaken, dan pendeta (Sinode GKJ, 2005: 43-44). Harus diakui bahwa ajaran GKJ mengenai kepemimpinan gereja masih sangat berpusat pada jabatan gerejawi. Sisi manusiawi kepemimpinan gereja dipahami sebagai semata-mata kepemimpinan para pejabat gerejawi yang ditahbiskan (pendeta) dan diteguhkan (penatua dan diaken). Kepemimpinan warga biasa, termasuk

kepemimpinan ketua kelompok, belum mendapat tempat dalam ajaran GKJ. Padahal, dalam praktik kehidupan berjemaat, peran ketua kelompok justru sangat penting, dan dalam realitasnya justru menjadi wajah sehari-hari dari karya organisasi, pastoral, dan ministerial jemaat.

Kepemimpinan gereja bukanlah kepemimpinan yang berorientasi memegang kekuasaan, melainkan yang berorientasi pelayanan, dan diwujudkan dengan berbagi kekuasaan. Kekuasaan dalam kepemimpinan jemaat, dengan demikian, tidak boleh menjadi sesuatu yang berada di satu titik. Sebagai suatu kehidupan bersama, kepemimpinan dalam GKJ perlu menganut semangat “pluralitas kekuasaan” sebagaimana digagas oleh filsuf Prancis, Michel Foucault. Foucault berujar, “The omnipresence of power: not because it has the privilege of consolidating everything under its invincible unity, but because it is produced from one moment to the next, at every point, or rather in every relation from one point to another. Power is everywhere; not because it embraces everything, but because it comes from everywhere” (Foucault, 1978: 93).

Dalam hal berbagi kepemimpinan dan pelayanan antara pejabat gerejawi dan warga biasa, Andar Ismail mengingatkan bahwa pemberdayaan warga biasa sangat penting. Ia mengungkapkan,

Pemberdayaan kaum awam tidak bermaksud memperjuangkan posisi yang lebih tinggi dalam struktur gereja bagi kaum awam, dan juga tidak bermaksud menurunkan posisi pendeta. Maksud pemberdayaan kaum awam adalah agar gereja jangan menjadi ibarat stadion sepak bola di mana hanya segelintir orang saja

yang bermain, sedangkan ribuan orang lain yang hadir hanya boleh berfungsi sebagai penonton (Ismail, 1999: 176).

Dalam gereja-gereja paradigma baru (*new paradigm churches*) yang bercorak kontemporer, misalnya, warga jemaat biasa dapat memasuki semua fungsi ministerial—hampir tanpa kecuali (Cornelio, 2007: 4). Walau demikian, Leo J. Koffeman mengingatkan agar pelayanan *laity* atau warga biasa di tengah jemaat jangan ditempatkan dalam situasi berhadap-hadapan dengan pelayanan pejabat gerejawi. Ditegaskannya, “A ‘layperson’ should not first of all be interested in rights over against (ordained) ministry, but rather in his or her calling in the world.... Therefore, ordained ministry as well is called to take the congregation seriously in what it can contribute to the ministry of the church” (Koffeman, 2014: 114).

Melalui refleksi teologis di sepanjang kajian ini, penulis memberikan beberapa rekomendasi transformasi kepemimpinan jemaat melalui *pendekatan berbagi kepemimpinan dan pelayanan*. Rekomendasi ini dapat diterapkan di jemaat-jemaat Gereja Kristen Jawa, namun juga di jemaat-jemaat gereja lain. Beberapa rekomendasi itu adalah sebagai berikut:

1. Penulis merekomendasikan “*pendekatan gugus*” sebagai *pendekatan berbagi kepemimpinan dan pelayanan, khususnya pada proses pengambilan keputusan*. Dalam pendekatan ini, penulis menganjurkan adanya pemilahan persoalan-persoalan jemaat ke dalam tiga gugus, yaitu: (1) persoalan teknis, (2) persoalan administratif, dan

(3) persoalan strategis. *Persoalan-persoalan teknis* berarti persoalan yang berkaitan dengan teknis perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kegiatan pelayanan jemaat. *Persoalan-persoalan administratif* berarti persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi keseharian jemaat, kebutuhan-kebutuhan rutin, dan hal-hal yang membutuhkan respons segera. Sedangkan *persoalan-persoalan strategis* berarti persoalan yang berkaitan dengan strategi karya-karya pengajaran, pengembangan, peribadahan, dan diakonia.

Majelis jemaat dan badan-badan pelayanan, termasuk pengurus kelompok, memiliki wewenang untuk mengambil keputusan secara mandiri pada gugusnya masing-masing. Ketua kelompok berwenang mengambil keputusan atas persoalan-persoalan teknis. Sidang Majelis Pekerja Harian (MPH) berwenang mengambil keputusan atas persoalan-persoalan administratif, sedangkan Sidang MPL menjadi wadah pengambil keputusan atas persoalan-persoalan strategis. Melalui pendekatan ini, di satu sisi, tidak semua persoalan di tengah jemaat harus dibawa dan diputuskan di Sidang MPL. Di sisi lain ketua kelompok menjadi lebih kuat perannya, karena diberi wewenang untuk turut mengambil keputusan secara mandiri.

2. *Penulis merekomendasikan perlunya GKJ menyusun aturan yang lebih jelas dalam TGTL-GKJ*

mengenai kepemimpinan warga jemaat biasa, baik untuk pengurus kelompok, pengurus komisi, maupun badan pelayanan gerejawi lainnya. Hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur syarat-syarat, tata cara pemanggilan, maupun masa pelayanan ketua kelompok. Ketidadaan aturan dalam penataan gereja terkait hal ini telah menciptakan preseden yang tidak baik, di mana, misalnya, seseorang bisa menjalani pelayanan sebagai pengurus atau ketua kelompok selama lebih dari dua periode. Kenyataan ini bertentangan dengan asas kesederajatan dan pemerataan kepemimpinan sebagaimana dalam PPA-GKJ (Sinode GKJ, 2005: 43).

3. *Penulis merekomendasikan transformasi dalam hal ajaran, khususnya eklesiologi, tentang kepemimpinan GKJ.* Gereja Kristen Jawa secara sinodal perlu mengkaji dan melakukan perubahan-perubahan pada eklesiologi dan ajaran gereja yang berkaitan dengan kepemimpinan gereja, dengan titik berangkat bukan pada jabatan gerejawi, melainkan pada hakikat pelayanan yang sesungguhnya. BEM, sebagai dokumen oikumenis, memahami *ministry* sebagai “the service to which *the whole people of God* is called” (World Council of Churches, 1982: 21). Bertolak dari pemahaman itu, PPA-GKJ perlu memandang kepemimpinan warga jemaat biasa sebagai bagian utuh dari kepemimpinan gereja secara luas dan perlu mendapatkan pembahasan

yang cukup dalam ajaran gereja. Bentuk kepemimpinan gereja tidak boleh dipahami sebagai semata-mata kepemimpinan dewan majelis gereja, atau kepemimpinan para pejabat gerejawi, melainkan sebagai kepemimpinan umat secara bersama-sama, di mana di dalamnya terdapat kepemimpinan pejabat gerejawi dan warga jemaat biasa.

KESIMPULAN

Jabatan gerejawi (kepemimpinan melalui penahbisan dan peneguhan) telah lama menjadi pusat kepemimpinan gereja, hingga tidak jarang kemudian mewujud menjadi sebuah otokrasi yang meminggirkan kepemimpinan warga jemaat biasa ke periferi. Padahal, Yesus dalam kepemimpinan-Nya tidak pernah menyakralkan dan memutlakkan kekuasaan-kekuasaan manusia. Ia mengakui struktur kepemimpinan, tetapi memandangnya secara kritis. Fokus kepemimpinan Yesus tidak lain adalah teologi Kerajaan Allah (Wijaya, 2018: 137-138). Dalam model kepemimpinan Yesus, yang menjadi orientasi kepemimpinan bukanlah jabatan melainkan nilai-nilai Kerajaan Allah.

Melalui artikel ini diperlihatkan bahwa kepemimpinan warga jemaat biasa memiliki fungsi dan peran penting dalam pembangunan jemaat. Kepemimpinan warga biasa, yang dalam tulisan ini tampak melalui peran organisatoris, pastoral, dan sinergis, para ketua kelompok di GKJ, merupakan wujud kemitraan sejajar dengan kepemimpinan para pejabat gerejawi. Melalui pendekatan berbagi

kepemimpinan dan pelayanan, warga jemaat semakin dilibatkan untuk ambil bagian dalam pelayanan, sehingga mereka semakin menyadari jati diri serta misi dan perutusannya di dunia. Dengan demikian, jemaat semakin memperlihatkan tanda-tanda esensial Gereja yang menjalani panggilannya, yaitu “hidup dalam persekutuan dengan Allah, berbagi kehidupan bersama dalam Kristus, dan bersaksi bagi dunia yang diperbarui” (Purwanto, 1999: 10).

DAFTAR PUSTAKA

- Cornelio, Jayeel Serrano. 2007. “The Minister Is Lay: Social Organization in New Paradigm Christianity”, *Global Missiology*, Vol. 1 No. 5, <http://ojs.globalmissiology.org/index.php/english/article/view/204> (diakses 20.07.2020).
- Dece, Elliya. 2019. “Pengaruh Kepemimpinan Gembala Sidang Terhadap Motivasi Pelayanan Kaum Awam”, *Diegesis*, Vol. 2 No. 1: 25-34, <https://www.ojs.sttrealbatam.ac.id/index.php/diegesis/article/view/45> (diakses 06.08. 2020).
- Ford, Kevin Graham. 2008. *Transforming Church: Bringing out the Good to Get to Great*, Colorado Springs, CO: David C. Cook.
- Foucault, Michel. 1978. *The History of Sexuality*, New York: Pantheon Books.
- French, John R.P., and Bertram Raven. 1959. “The Bases of Social Power”, *Studies in Social Power*, Ann Arbor, Mi: Institute for Social Research, University of Michigan, 151-164,

- https://www.researchgate.net/publication/215915730_The_bases_of_social_power, diakses 6 Agustus 2020
- Hendriks, Jan. 2002. *Jemaat Vital dan Menarik: Membangun Jemaat dengan Menggunakan Metode Lima Faktor*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Huizing, Russell. 2011. "Bringing Christ to the Table of Leadership: Moving Towards a Theology of Leadership", *Journal of Applied Christian Leadership*, Vol. 5 No. 2: 58-75. <https://digitalcommons.andrews.edu/jacl/vol5/iss2/5> (diakses 20.07.2020).
- Ipaq, Eli Wilson, dan Hengki Wijaya. 2019. "Kepemimpinan Para Rasul dan Relevansinya Bagi Pemimpin Gereja di Era Revolusi Industri 4.0", *Integritas*, Vol. 1 No. 2: 112-122, <https://doi.org/10.31219/osf.io/7b65k> (diakses 06.08.2020).
- Ismail, Andar. 1999. *Awam dan Pendeta: Mitra Membina Gereja*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Katarina, K, and Krido Siswanto. 2018. "Keteladanan Kepemimpinan Yesus dan Implikasinya bagi Kepemimpinan Gereja pada Masa Kini", *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, Vol. 2 No. 2: 87-98, <https://doi.org/10.46445/ejti.v2i2.102> (diakses 06.08.2020).
- Koffeman, Leo J. 2014. *In Order to Serve: An Ecumenical Introduction to Church Polity*, Zürich: Lit.
- Maddix, Mark. 2009. "A Biblical Model of the People of God: Overcoming the Clergy/Laity Dichotomy", *Christian Education Journal: Research on Educational Ministry*, Vol. 6 No. 2: 214-228, <https://doi.org/10.1177/073989130900600203> (diakses 20.07.2020).
- Mintardjo, Jeannette Josephine, and Yahya Wijaya. 2020. "Etika Kepemimpinan Kristen dalam Perspektif Poskolonial: Studi Kasus Program Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa di Universitas Kristen Duta Wacana", *Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian*, Vol. 5 No. 1: 49-64, <https://doi.org/10.21460/gema.2020.51.409> (diakses 06.08.2020).
- Ndapamuri, John, and Enggar Objantoro. 2019. "Kepemimpinan Multi Staff dalam Gereja Lokal", *Integritas*, Vol. 1 No. 2: 123-131, <http://journal.sttjaffrayjakarta.ac.id/index.php/JI/article/view/11> (diakses 06.08.2020).
- Octavianus, Welly. 2020. "Strategi Optimalisasi Kinerja Kepemimpinan Gereja Lokal", *Integritas*, Vol. 2 No. 1: 77-94, <http://journal.sttjaffrayjakarta.ac.id/index.php/JI/article/view/25> (diakses 06.08.2020).
- Ott, E. Stanley. 2002. *Twelve Dynamic Shifts for Transforming Your Church*, Grand Rapids, Mich: William B. Eerdmans.
- Purwanto, Lazarus H. 1999. "Pembangunan Jemaat: Sebuah Perkenalan Awal", Suleeman, Ferdinand, Sutarna, Adji Ageng dan Rajendra, A. (eds.), *Bergumul dalam Pengharapan: Buku Penghargaan untuk Pdt. Dr. Eka Darmaputera*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 3-17.

Sinode GKJ. 2005. *Pokok-Pokok Ajaran Gereja Kristen Jawa*, Salatiga: Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa.

_____. 2015. *Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Jawa*, Salatiga: Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa.

Wijaya, Yahya. 2018. “Kepemimpinan Yesus Sebagai Acuan Bagi Kepemimpinan Gereja Masa Kini”, *Jurnal Jaffray*, Vol. 16 No. 2: 129-144, <https://doi.org/10.25278/jj71.v16i2.287> (diakses 03.08.2020).

World Council of Churches. 1982. *Baptism, Eucharist, and Ministry*, Geneva: World Council of Churches.

Catatan:

¹ Ada dua persidangan majelis gereja yang dikenal di Gereja-gereja Kristen Jawa, yaitu: (1) Sidang Majelis Pekerja Harian (Sidang MPH) yang dihadiri Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan para Ketua Bidang, dan (2) Sidang Majelis Pekerja Lengkap (Sidang MPL) yang dihadiri oleh semua anggota majelis gereja.

² TGTL-GKJ membedakan antara “penahbisan” untuk pendeta dan “peneguhan” untuk penatua, diaken, atau pendeta yang alih pelayanan ke jemaat lain.

³ Penulis menggunakan frasa “warga jemaat biasa” atau “warga biasa”, alih-alih frasa “awam” atau “warga awam”. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) mengartikan “awam” sebagai: (1) umum, am, kebanyakan, biasa, tidak istimewa; (2) orang kebanyakan, orang biasa (bukan ahli, bukan rohaniwan, bukan tentara). Kata yang kerap dipakai dalam bahasa Inggris adalah *lay*, *layman*, atau *laity*, yang agaknya berakar dari kata *λαός* (*laos*) dalam Alkitab (Koffeman, 2014: 114), yang diterjemahkan oleh LAI sebagai “umat”, misalnya dalam 1 Petrus 2:9-10. Dalam tulisan ini, frasa “warga biasa” atau “warga jemaat biasa” dipahami sebagai warga jemaat yang tidak menerima penahbisan (*ordination*) atau peneguhan (*confirmation*).

⁴ Sejak TGTL-GKJ ditetapkan tahun 2015, istilah “badan pelayanan” digunakan, menggantikan istilah

“badan pembantu majelis” (Sinode GKJ, 2015: 58).

⁵ Dalam pelaksanaan penelitian lapangan tersebut, penulis dibantu oleh seorang sahabat, Elly Diah Praptanti, yang atas bantuannya penulis mengucapkan terima kasih.

⁶ Clean Verbatim Wawancara dengan Ketua-Ketua Kelompok GKJ Bekasi Timur tanggal 21 Maret 2020, h. 9.

⁷ Clean Verbatim Wawancara dengan Ketua-Ketua Kelompok GKJ Bekasi Timur tanggal 4 April 2020, h. 11.

⁸ Respons Wawancara Online dengan Ketua-Ketua Kelompok GKJ Bekasi Timur tanggal 24 Oktober 2020.

⁹ Clean Verbatim Wawancara dengan Ketua-Ketua Kelompok GKJ Bekasi Timur tanggal 4 April 2020, h. 12.

¹⁰ Clean Verbatim Wawancara dengan Ketua-Ketua Kelompok GKJ Bekasi Timur tanggal 11 April 2020, h. 7.

¹¹ Clean Verbatim Wawancara dengan Ketua-Ketua Kelompok GKJ Bekasi Timur tanggal 28 Maret 2020, h. 5.

¹² Clean Verbatim Wawancara dengan Ketua-Ketua Kelompok GKJ Bekasi Timur tanggal 28 Maret 2020, h. 1.

¹³ Clean Verbatim Wawancara dengan Ketua-Ketua Kelompok GKJ Bekasi Timur tanggal 11 April 2020, h. 2.

¹⁴ Clean Verbatim Wawancara dengan Ketua-Ketua Kelompok GKJ Bekasi Timur tanggal 4 April 2020, h. 11.

¹⁵ Respons Wawancara Online dengan Ketua-Ketua Kelompok GKJ Bekasi Timur tanggal 24 Oktober 2020.

¹⁶ Clean Verbatim Wawancara dengan Ketua-Ketua Kelompok GKJ Bekasi Timur tanggal 11 April 2020, h. 4.

¹⁷ Respons Wawancara Online dengan Ketua-Ketua Kelompok GKJ Bekasi Timur tanggal 24 Oktober 2020.

¹⁸ Clean Verbatim Wawancara dengan Ketua-Ketua Kelompok GKJ Bekasi Timur tanggal 4 April 2020, h. 11.

¹⁹ Clean Verbatim Wawancara dengan Ketua-Ketua Kelompok GKJ Bekasi Timur tanggal 21 Maret 2020, h. 8.

²⁰ Respons Wawancara Online dengan Ketua-Ketua Kelompok GKJ Bekasi Timur tanggal 24 Oktober 2020.

²¹ Clean Verbatim Wawancara dengan Ketua-Ketua Kelompok GKJ Bekasi Timur tanggal 28 Maret 2020, h. 6.

²² Clean Verbatim Wawancara dengan Ketua-Ketua Kelompok GKJ Bekasi Timur tanggal 4 April 2020, h. 12.

²³ Clean Verbatim Wawancara dengan Ketua-Ketua Kelompok GKJ Bekasi Timur tanggal 11 April 2020, h. 3.

²⁴ Clean Verbatim Wawancara dengan Ketua-Ketua Kelompok GKJ Bekasi Timur tanggal 28 Maret 2020, h. 6.

²⁵ Respons Wawancara Online dengan Ketua-Ketua Kelompok GKJ Bekasi Timur tanggal 24 Oktober 2020.

²⁶ BEM memahami *ministry* sebagai “the service to which the whole people of God is called” (World Council of Churches, 1982: 21).